

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di zaman yang sudah modern, Indonesia mengalami kemajuan sangat pesat di berbagai bidang tidak terkecuali dalam bidang teknologi yang mampu membawa banyak perubahan baik maupun buruk bagi penggunanya. Salah satu dampak yang muncul yaitu tentang pengetahuan serta perilaku dalam mengelola keuangan di berbagai elemen masyarakat ataupun pemerintahan seperti pada pengelolaan keuangan di setiap daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan dana desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk di kelola oleh masyarakat melalui pemerintahan desa dengan tujuan agar memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Desa tidak lagi sekadar menjadi objek, melainkan telah bertransformasi menjadi subjek dalam pembangunan saat ini. Desa diberi keleluasaan untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, melaporkan serta mempertanggungjawabkan sendiri pembangunannya. Ada kewenangan lebih kepada pemerintah desa untuk membangun sesuai kebutuhan lokal. Ditambah ada anggaran retribusi ekonomi lebih yang diterima desa melalui Dana Desa dari pemerintah pusat. Pasal 1 angka 8 UU No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pada

Pasal 78 ayat 1 memberikan penegasan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

**Tabel I. 1**  
**Presentase dan Pendidikan Kepala Desa**

<b>Pendidikan KADES</b>	<b>Presentase</b>
Tidak Sampai SMA	17,01%
SMA	57,54%
S1	23,62%
S2/S3	1,83%

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2021*

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2021, menunjukkan bahwa mayoritas kepala desa di Indonesia memiliki tingkat pendidikan menengah, yaitu lulusan SMA, dengan persentase sebesar 57,54%. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan menengah masih menjadi latar belakang pendidikan terbanyak di kalangan pemimpin desa. Sementara itu, kepala desa yang memiliki pendidikan tinggi jenjang Strata 1 (S1) berjumlah 23,62%, dan yang menempuh pendidikan lebih lanjut hingga Strata 2 atau 3 (S2/S3) hanya 1,83%. Menariknya, masih terdapat 17,01% kepala desa yang belum menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA. Secara umum, data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kepala desa memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memadai untuk menjalankan tugas administratif dan kepemimpinan di tingkat desa, meskipun proporsi lulusan pendidikan tinggi masih tergolong rendah.

Kondisi pendidikan kepala desa secara nasional tersebut memberikan gambaran umum mengenai kualitas sumber daya manusia yang memimpin pemerintahan desa, termasuk di wilayah Kecamatan Padureso. Sebagai kecamatan yang terdiri dari sembilan desa, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Padureso sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan latar belakang pendidikan para kepala desanya. Pendidikan yang memadai diyakini dapat menunjang kemampuan kepala desa dalam menjalankan fungsi administratif, mengambil keputusan strategis, serta memberdayakan masyarakat secara optimal.

Kecamatan Padureso merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Prembun. Dasar pembentukan wilayah Kecamatan Padureso ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah. Kecamatan Padureso memiliki luas wilayah sebesar 28,95 Km<sup>2</sup>. Secara administratif, wilayah Kecamatan Padureso terbagi menjadi 9 (Sembilan) Desa, yaitu Desa Pejongkolan, Desa Balingasal, Desa Merden, Desa Kalijering, Desa Sidototo, Desa Kaligubug, Desa Padureso, Desa Sendangdalem dan Desa Rahayu.

<https://kec.padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/197/profil>

**Tabel I. 2**  
**Jumlah Dana Desa Padureso tahun 2025**

<b>Deskripsi</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Bantuan Keuangan (Provinsi)</b>
Anggaran	Rp90.000.000	Rp1.510.000.000
Realisasi	Rp45.850.553	Rp300.000.000

*padureso.kebumenkab.go.id*

Berdasarkan data dari laman resmi Kecamatan Padureso, alokasi dana desa tahun 2025 menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan

antara anggaran dan realisasi. Pendapatan Asli Desa (PADes) dianggarkan sebesar Rp90.000.000, namun hanya terealisasi sebesar Rp45.850.553, atau sekitar 50,95% dari total anggaran. Sementara itu, bantuan keuangan dari provinsi memiliki alokasi anggaran jauh lebih besar, yaitu Rp1.510.000.000, namun realisasinya hanya mencapai Rp300.000.000, atau sekitar 19,87%. Rendahnya tingkat realisasi ini dapat mengindikasikan adanya kendala dalam penyaluran, pengelolaan, atau penggunaan dana yang tersedia, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas pembangunan dan pelayanan publik di wilayah desa. Hal ini juga memperkuat pentingnya kapasitas kepala desa dalam hal manajemen keuangan dan tata kelola pemerintahan desa secara akuntabel.

Dalam konstruksi Pasal 3 Permendagri No. 113 No. 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memang disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Namun, mengingat beratnya tanggung jawab, Kepala Desa tidak lagi dapat bertindak seenaknya. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara merupakan struktur yang dibentuk aturan perundangan untuk membantu Kepala Desa. Sayangnya, di sebagian besar desa, fungsi ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak Kepala Desa yang masih *one man show* atau pemimpin hanya bermain sendiri dalam menjalankan tugasnya. Segala aspek pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban tidak melibatkan seluruh fungsi yang dikehendaki aturan. Kas desa dipegang, dicatat dan dilaporkan sendiri oleh kepala desa menjadi berita yang masih sering didengar. Akibatnya fungsi pengendalian internal tidak berjalan.

Permasalahan lemahnya tata kelola keuangan desa tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga mencerminkan rendahnya pemahaman dan kemampuan pengelolaan keuangan di tingkat desa. Minimnya partisipasi perangkat desa dalam mekanisme yang seharusnya kolektif menunjukkan masih terbatasnya literasi keuangan yang memadai di kalangan aparatur desa. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta menjadi hambatan dalam memperluas akses dan pemanfaatan layanan keuangan yang efektif bagi masyarakat desa. Ketimpangan antara pengetahuan keuangan dan akses terhadap layanan keuangan pun masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

**Tabel I. 3**  
**Perbandingan Indeks literasi dan inklusi keuangan**  
**Tahun 2019 dan 2022**

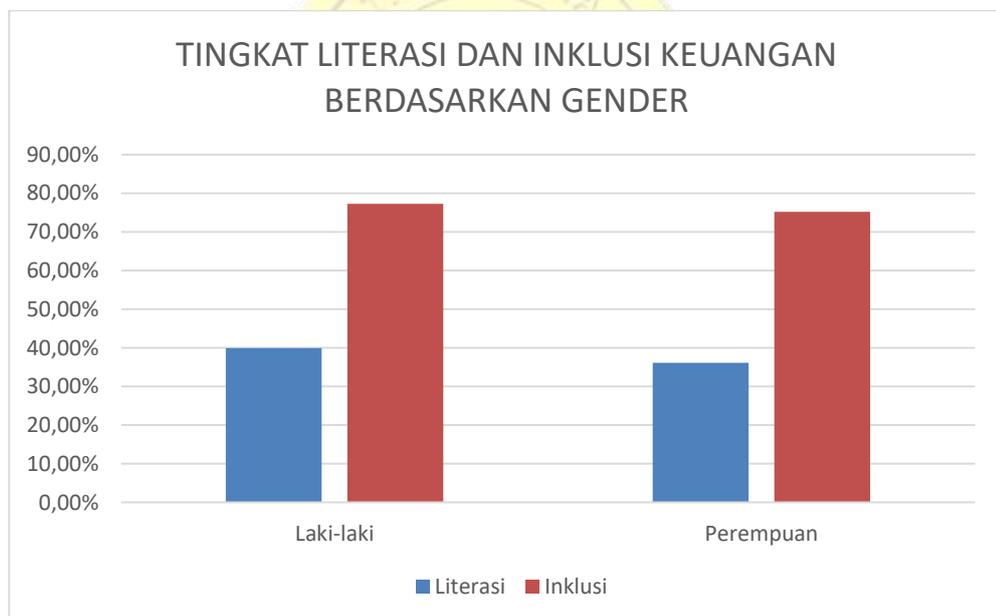
<b>Indeks</b>	<b>2019</b>	<b>2022</b>
Literasi	38,03%	49,68%
Inklusi	76,19%	85,10%
Gap	38,16%	35,42%

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan*

Survei OJK 2019, yang melibatkan 12.773 responden dari 34 provinsi dan 67 kabupaten/kota, mencakup seluruh sektor jasa keuangan yang diawasi OJK, seperti perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

Pengukuran SNLIK 2019 menggunakan indikator yang sama dengan survei sebelumnya (2013 dan 2016), yakni literasi keuangan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, serta inklusi keuangan berdasarkan penggunaan produk/layanan dalam satu tahun. Di wilayah perkotaan, tingkat literasi dan inklusi keuangan masing-masing mencapai 41,41% dan 83,60%, sementara di perdesaan 34,53% dan 68,49%. Survei juga menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, yaitu 39,94% dan 77,24% berbanding 36,13% dan 75,15%."

**Gambar 1. 1**  
**Hasil Survei Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Gender**



Persentase literasi keuangan tertinggi berdasarkan sektor keuangan adalah sektor Perbankan (36,12%), diikuti sektor Perasuransian (19,40%), sementara sektor Lembaga Keuangan Mikro memiliki literasi terendah (0,85%). Ini menunjukkan bahwa mayoritas pemahaman masyarakat Indonesia

terbatas pada sektor perbankan. Penggunaan produk/layanan keuangan juga didominasi sektor perbankan (73,88%). Hasil survei ini menunjukkan adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan, di mana banyak orang memiliki akses atau produk keuangan tanpa pemahaman yang cukup tentang manfaat dan risikonya, yang akhirnya bisa merugikan mereka.

Untuk mencapai perilaku pengelolaan keuangan (*financial management behavior*), maka diperlukan sikap keuangan (*financial attitude*) yang positif untuk diimplementasikan secara langsung. Menurut Andre *et al* (2023) sikap keuangan merupakan tindakan pengambilan keputusan seseorang berdasarkan prinsip dirinya. Sikap keuangan merupakan perasaan dan pikiran seseorang atas keuangan yang dimilikinya. Sikap keuangan merupakan sikap atas pengambilan keputusan terhadap keuangan mereka dalam melakukan pengelolaan keuangan, penganggaran keuangan, dan investasi. Perilaku pengelolaan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Wicaksono & Nuryana, (2020) menyatakan sikap keuangan dapat berpengaruh pada perilaku pengelolaan keuangan. Penelitian oleh Aida & Rochmawati, (2022) menyatakan perilaku pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh locus of control, sikap keuangan, dan pengetahuan keuangan.

Menurut Azizah, (2020), Pengetahuan merupakan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman individu tentang konsep keuangan, termasuk kemampuan individu untuk mengelola keuangannya, diukur dengan ketepatan pengambilan keputusan jangka pendek atau perencanaan keuangan masa depan dalam menanggapi kondisi ekonomi. Financial knowledge menurut Sandi *et al*

(2020) menyebutkan bahwa pengetahuan keuangan dapat diperoleh dari pendidikan, termasuk pendidikan formal seperti sekolah, seminar, pelatihan, dan pendidikan non-formal seperti dari orang tua, teman, pengalaman kerja dan pengalaman pribadi. Menurut Keller dalam (Sandi *et al.*, 2020) Financial knowledge adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengelola keuangan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan untuk menghindari masalah keuangan. Dengan asumsi bahwa pendidikan yang baik dapat meningkatkan pengetahuan keuangan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan keuangan yang lebih efektif. Financial knowledge menurut Gitayuda (2022:27) adalah kemampuan seseorang dalam memahami konsep keuangan dan memiliki kepercayaan diri dalam mengelola keuangannya sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas. Menurut Triani & Wahdiniwaty, (2020) menyebutkan bahwa indikator dalam Pengetahuan Keuangan mencakup 5 konsep, diantaranya pengetahuan dasar keuangan pribadi, pengetahuan manajemen uang, pengetahuan manajemen kredit dan utang, pengetahuan tabungan dan Investasi, dan pengetahuan manajemen risiko.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi yang diduga dapat mempengaruhi perilaku manajemen keuangan adalah sikap keuangan yang umumnya sikap keuangan diartikan sebagai perilaku seseorang individu terhadap uang yang dimiliki. Menurut Kusumawati *et al* (2021) , sikap keuangan adalah pengetahuan seseorang terkait keuangan yang dibentuk dengan fokus pada pengelolaan keuangan. pemahaman tentang sikap keuangan

akan membantu kita belajar tentang apa yang diyakini terkait dengan uang. Sikap akan merujuk pada individu pelaku yang memiliki masalah keuangan pribadi, hal ini dapat diukur dengan menanggapi suatu pernyataan atau pendapat (Herdjiono & Damanik, 2016).

Menurut Khoirunnisa & Rochmawati, (2021) Sikap keuangan merupakan penilaian, pola berfikir serta pendapat seseorang mengenai keuangan yakni terdiri atas keuangan pribadi, keamanan uang dan filosofi uang. Sikap keuangan dapat menunjang seseorang dalam penentuan perilaku serta sikap dalam penganggaran finansial, membuat keputusan, dan pengelolaan finansial. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka Sikap Keuangan adalah persepsi, pola keadaan pikiran, keyakinan ataupun pandangan yang menggambarkan kepribadian seseorang didasari penilaian psikologis meliputi bagaimana seseorang beranggapan terhadap sumber daya keuangannya yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadi faktor untuk menentukan keputusan keuangan yang akan diambil. Menurut Triani & Wahdiniwaty, (2020) menyatakan bahwa indikator Sikap Keuangan dapat dilihat dari 6 (enam) hal yaitu *Obsession, power, effort, inadequacy, retention dan security*.

Sikap yang dimiliki seseorang mengenai keuangan dapat berpengaruh terhadap cara seseorang saat melakukan pengelolaan terhadap keuangan serta dalam perilaku keuangannya (Aida & Rochmawati, 2022). Seseorang yang memiliki sikap baik terhadap keuangannya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan mengenai

keuangannya, agar mendapatkan hasil yang lebih baik pula. Sesuai dengan Anugrah dalam (Aida & Rochmawati, 2022) dan jurnal internasional oleh Siswanti & Halida (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan berpengaruhnya antara sikap keuangan pada perilaku pengelolaan keuangan. Akan tetapi didapatkan hasil yang bertolak belakang pada Rizkiawati & Asandimitra (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan tidak adanya pengaruh dalam Sikap Keuangan pada Perilaku Pengelolaan Keuangan.

*Locus of control* merupakan kepribadian seseorang mengenai pengendalian dirinya agar mampu bersikap secara etis sehingga tidak berdampak buruk dimasa yang akan datang (Dewanti & Asandimitra, 2021). *Locus of control* merupakan keyakinan individu dalam memandang kesuksesan maupun kegagalan dirinya, apakah kesuksesan dan kegagalan tersebut terjadi karena faktor dari dalam diri atau dari luar dirinya. Saat menyikapi setiap peristiwa dalam hidup, individu dipengaruhi keyakinan terhadap segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, baik faktor dari dalam diri (internal) ataupun faktor lain yang ada di luar dirinya (eksternal).

*Locus of control* dibagi menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. *Locus of control* internal meyakini bahwa apa yang diperoleh seseorang dalam hidupnya sepenuhnya merupakan hasil dari kemampuan dan usaha yang dimilikinya sendiri. Seseorang yang cenderung memiliki *locus of control* internal percaya bahwa segala sesuatu yang dialaminya disebabkan oleh kendali dirinya sendiri. Ia merasa mampu mengendalikan situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidupnya. Sebaliknya, pada *locus of control* eksternal,

seseorang meyakini bahwa apa yang diperoleh dalam hidupnya lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya, seperti keberuntungan, nasib, atau takdir. Berbagai hasil penelitian mendukung pandangan ini. Payne mengemukakan bahwa *locus of control* eksternal lebih dominan pada usia 14-16 tahun, kemudian beralih menjadi internal pada usia 18 tahun.

Penelitian lain oleh Breet *et al.* menunjukkan bahwa anak muda cenderung memiliki *locus of control* eksternal, sementara orang dewasa lebih cenderung memiliki locus of control internal. Bernardi juga menemukan bahwa locus of control cenderung stabil sejak sekolah menengah hingga usia 50 tahun, yang berkaitan dengan kematangan berpikir dan kemampuan dalam pengambilan keputusan.. *Locus of control* dalam hal ini merupakan suatu tindakan seseorang terhadap keuangannya seperti mengendalikan perilaku konsumtif, berhemat serta tindakan tindakan lainnya. Seseorang harus bisa mengendalikan peristiwa yang terjadi pada kehidupannya terutama pada masalah pengelolaan keuangan agar tidak menyebabkan kegagalan *financial*. Sejalan dengan Sulistyarini dalam (Aida & Rochmawati, 2022) mengatakan ada dampak positif antara *locus of control* pada pengelolaan mengenai keuangan. Tetapi adanya hasil yang berbeda diperoleh dari Amanah *et al.* dalam (Aida & Rochmawati, 2022) mengungkapkan faktor *locus of control* mempunyai pengaruh negatif dengan pengelolaan keuangan pribadinya.

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Locus of Control* dan Perilaku Pengelolaan Keuangan khususnya pada pegawai pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Padureso bahwa masih perlunya

pengetahuan keuangan. dan juga sikap keuangan yang dapat diukur dengan opininya terhadap uang yang lebih menunjukkan atau mengarahkan untuk lebih bersikap rasional dan percaya diri dalam pengendalian tentang praktik keuangan. Dan nantinya hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur dalam melakukan pengelolaan keuangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat hasil yang berbeda-beda dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Melalui *Locus Of Control* Pada Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Padureso”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Secara rinci permasalahan penelitian ini dapat diajukan tujuh pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Keuangan berpengaruh positif terhadap *Locus Of Control*?
2. Apakah Sikap Keuangan berpengaruh positif terhadap *Locus Of Control* ?
3. Apakah Pengetahuan Keuangan berpengaruh positif terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan?
4. Apakah Sikap Keuangan berpengaruh positif terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan?
5. Apakah *Locus Of Control* berpengaruh positif terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan?

6. Apakah *Locus Of Control* mampu memediasi Pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan?
7. Apakah *Locus Of Control* mampu memediasi Sikap Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan?

### **1.3. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak meluas maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahannya sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya menangkup variabel Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap *Locus Of Control* dan Perilaku Pengelolaan Keuangan di wilayah Desa Padureso Kabupaten Kebumen.
2. Penelitian ini hanya melibatkan pegawai pemerintahan desa di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap *Locus Of Control* dan Perilaku Pengelolaan Keuangan.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap *Locus Of Control*.
3. Untuk mengetahui Sikap Keuangan terhadap *Locus Of Control*.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan.

5. Untuk mengetahui Sikap Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan.
6. Untuk mengetahui apakah *Locus Of Control* mampu memediasi Pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan
7. Untuk mengetahui apakah *Locus Of Control* mampu memediasi Sikap Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan

### 1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang terus berkembang serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan teoritis dan praktis dalam bidang ini. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh pengetahuan keuangan dan sikap keuangan terhadap *Locus of Control* dan perilaku pengelolaan keuangan khususnya di wilayah Kabupaten Kebumen.
  - b. Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *Locus Of Control* dan perilaku pengelolaan keuangan di wilayah Kabupaten Kebumen.
  - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh peneliti selanjutnya, khususnya bagi peneliti yang memiliki objek penelitian yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan, serta dapat menambah pengetahuan tentang penerapan *Locus Of Control* dan perilaku pengelolaan keuangan yang lebih baik. Sehingga dalam kehidupan nyata nantinya peneliti dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dalam konsumsi, investasi, dan tabungan.

### b. Bagi Pemerintahan

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya pengetahuan keuangan dan sikap keuangan terhadap *locus of control* dan perilaku pengelolaan keuangan khususnya bagi wilayah Kabupaten Kebumen dalam mengelola keuangan desa demi kesejahteraan masyarakat.

### c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mendukung penelitian mengenai pengaruh pengetahuan keuangan dan sikap keuangan terhadap *Locus of control* dan perilaku pengelolaan keuangan di wilayah Desa seluruh Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

d. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi awal untuk peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan pada variabel Independen atau variabel dependen.

